

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Diponegoro No. 01 Manna



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas perkenannya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 03 Tahun 2016, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Pembangunan di bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta pelaksanaan kebijakan Pembangunan Daerah. Keberadaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu ujung tombak Pembangunan di Daerah, memiliki Tugas dan Fungsi Pelayanan Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga dapat menjamin kesinambungan Pembangunan di Daerah. Secara garis besar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan pelayanan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan fungsi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Kapabilitas Tenaga Teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengkajian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Penyediaan Data Base Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang tersusun secara Sistematis, Akurat dan Akuntabel, sehingga kegiatan Pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan dapat tercapai.
3. Penyusunan Rencana Pembangunan dengan wajib memperhatikan dan mempedomani Dokumen-dokumen Perencanaan Daerah.
4. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik secara profesional dalam mengembangkan kreatifitas, menalarkan ide dalam membaca konsep Rencana Pembangunan yang ingin dicapai serta memformulasikan kedalam Rencana yang Aplikatif.
5. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi Dan Air Bersih Terutama bagi Masyarakat yang berpenghasilan Rendah dirasakan belum Maksimal.
6. Masih Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bengkulu Selatan yang perlu segera ditangani dengan bantuan Fasilitas Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
7. Penanganan Terhadap 15 Lokasi dalam kategori Kawasan Kumuh di Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Peningkatan dalam Penyediaan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan.

Dalam rangka memenuhi tugas pokok tersebut, serta sebagai upaya menciptakan peningkatan kesinambungan pembangunan di daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024 sebagai langkah awal penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang lebih baik dan berkesinambungan.

Manna, 2024

Kepala Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Bengkulu Selatan

DECKY ZULKARNAIN, S.Sos

NIP. 19731029 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	32
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BAB V PENUTUP	35
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa setiap daerah harus menyusun kegiatan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Kegiatan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Untuk dapat tercapainya kewajiban tersebut perlu adanya suatu perencanaan yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Perencanaan kerja sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai penggerak / ujung tombak pembangunan daerah mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta berkesinambungan secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan (DISPERKIM) Tahun Anggaran 2024 ini memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan dalam tahun 2024, yang mana didalam penyusunan Renja ini akan diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Darurat Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang
2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 09 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Thun 2005 tentang perubahan undang-undang nomir 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
4. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara noor 4438);
5. Undang-undang Nomor : 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangk panjang nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700)
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614)
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Noor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara /Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi, pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menampung dan melayani kebutuhan masyarakat pembangunan infrastruktur bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan kondisi yang diinginkan satu tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
2. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran dan staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan;
4. Memberikan pedoman pada pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024;
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga kegiatan pembangunan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) adalah sebagai berikut:

Sistimatika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun 2022 di tampilkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di sampaikan kepada Bupati Bengkulu Selatan untuk tahun 2022 merupakan tahun keenam melaksanakan program dan kegiatan di Organisasi Perangkat daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman Bengkulu Selatan dikarenakan OPD ini baru terbentuk pada bulan Desember tahun 2016.

Sasaran strategis kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022 dituangkan dalam indikator dan target kinerja sampai dengan tingkat output target yang menunjukan nilai kuantitas yang terus dicapai selama tahun 2022.

Untuk indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran merupakan himpunandari indikator, baik tingkat program maupun kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran merupakan jadwal tahunan untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam menjalankan misi ke-2 kepala Daerah.

Rencana Kerja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024 menguraikan kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024, yang dioperasikan melalui 5 program dan 12 kegiatan yang terdiri dari 27 Sub Kegiatan, sebagaimana diuraikan pada tabel 2.1 dibawah ini :

10	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Saluran Jalan, Drainase, dan Bangunan Jalan	200.000.000	-	-	-	-	284.351.500	284.351.500	142,18
11	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Saluran Jalan, Drainase, dan Bangunan Jalan	200.000.000	-	-	-	-	700.000.000	700.000.000	350,00
12	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Saluran Jalan, Drainase, dan Bangunan Jalan	200.000.000	-	-	-	-	700.000.000	700.000.000	350,00
13	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Saluran Jalan, Drainase, dan Bangunan Jalan	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000	200,00
14	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Saluran Jalan, Drainase, dan Bangunan Jalan	100.000.000	-	-	-	-	500.000.000	500.000.000	500,00
15	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Saluran Jalan, Drainase, dan Bangunan Jalan	3.580.000.000	1.416.480.000	1.500.000.000	2.768.885.200	151,36	1.450.000.000	5.135.385.100	915,07
16	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Saluran Jalan, Drainase, dan Bangunan Jalan	3.580.000.000	1.416.480.000	2.500.000.000	2.768.885.200	151,36	1.450.000.000	5.135.385.100	915,07
17	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Saluran Jalan, Drainase, dan Bangunan Jalan	-	-	300.000.000	-	-	300.000.000	300.000.000	300,00
18	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Saluran Jalan, Drainase, dan Bangunan Jalan	1.500.000.000	3.257.051.920	1.000.000.000	2.201.007.800	225,10	1.010.000.000	4.418.061.300	809,21
19	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Saluran Jalan, Drainase, dan Bangunan Jalan	-	59.419.400	200.000.000	17.817.400	8,94	80.000.000	157.216.800	40,97
20	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan	Saluran Jalan, Drainase, dan Bangunan Jalan	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	40.000.000	50,30

Ans Oct

Kode	Kategori	Program/Kegiatan/Titik Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja			Realisasi Kinerja			Keterangan
				K	Rp	K (%)	K	Rp	Rp (%)	
Skema Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman										
83.03.01	83.03.01	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman			10.377.933.300			504.079.313	4,86	
83.03.01.01	83.03.01.01	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman			3.309.600.300			658.635.649	19,62	
83.03.01.01.01	83.03.01.01.01	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman			47.493.500			0	0,00	
83.03.01.01.01.01	83.03.01.01.01.01	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman			20.042.000	0,1 Dokumen	21,00	0	0,00	
83.03.01.01.01.01.01	83.03.01.01.01.01.01	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman			21.451.500	0,1 Laporan	23,00	0	0,00	
83.03.01.01.01.01.01.01	83.03.01.01.01.01.01.01	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman			3.723.633.300			395.793.848	14,53	
83.03.01.01.01.01.01.01.01	83.03.01.01.01.01.01.01.01	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman			2.790.423.300	1,000 Bulan	38,67	331.143.849	11,85	
83.03.01.01.01.01.01.01.01.01	83.03.01.01.01.01.01.01.01.01	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman			333.210.000	0,2 Dokumen	20,00	64.636.000	19,40	
83.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01	83.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman			269.735.300			34.643.800	12,87	
83.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	83.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman			4.350.000	0,000	0,00	0	0,00	
83.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	83.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman			3.319.500	0,000	0,00	0	0,00	
83.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	83.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman			48.612.300	0,000	0,00	0	0,00	
83.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	83.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman			13.005.000	0,000	0,00	0	0,00	
83.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	83.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman			11.500.000	0,1 Dokumen	10,00	3.000.000	8,96	
83.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	83.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman			108.478.000	0,1 Laporan	10,00	11.843.800	10,79	
83.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	83.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pemantauan Pemukiman			65.795.900			0	0,00	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan tahun 2022 ditunjukkan melalui jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kegiatan pembangunan pada prinsipnya menggambarkan kualitas proses pembangunan yang semakin meningkat selama dua tahun terakhir. Beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan Musrenbang di tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang kabupaten;
2. Meningkatnya keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian.

Dalam peningkatan kualitas proses pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas peralatan penunjang kegiatan pembangunan. Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

1. Munculnya berbagai kebijakan Nasional dan kebijakan pengambil keputusan di daerah yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi kegiatan pembangunan di daerah;
2. Terdapatnya pertentangan / ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem kegiatan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme kegiatan pembangunan daerah;
3. Belum optimalnya hasil kegiatan pembangunan karena masih terdapat tumpang tindih perencanaan yang dilakukan oleh Badan/Dinas/Kantor;
4. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan kegiatan pembangunan dari instansi yang berkompeten;
5. Perubahan paradigma pembangunan yang menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dan mengakomodir aspirasi masyarakat;
6. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya;
7. Adanya dukungan pemerintah pusat dan propinsi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah;

8. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu sumber daya manusia melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar;
9. Adanya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
10. Adanya ketersediaan dan kesanggupan perguruan tinggi dan lembaga lainnya untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses kegiatan pembangunan di daerah;
11. Pengembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.

Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	SPK/Stan- dar Nasional	SKK	Target Kinerja Dispendik			Realisasi Capaian		Kinerja		Catatan Berkas/14.9
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah			80.000.000	25.000.000	75.000.000	53.792.500	51.810.000	25.000.000	51.810.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			25.000.000	25.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-	20.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-	20.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	-	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			-	20.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	-	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahapan Realisasi Kinerja SKPD			-	30.000.000	30.000.000	21.097.500	21.017.900	30.000.000	21.017.900	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	20.000.000	30.000.000	-	-	20.000.000	-	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.422.607.300	2.300.000.000	2.419.142.000	2.341.892.912	2.217.444.160	2.300.000.000	2.217.444.160	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			192.400.000	195.000.000	195.000.000	181.500.000	199.800.000	195.000.000	199.800.000	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-	30.000.000	30.000.000	-	-	30.000.000	-	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-	30.000.000	30.000.000	-	-	30.000.000	-	
12	Pengadaan Rukun Dinas Serta Atribut Kelembagaan			-	40.000.000	-	-	-	40.000.000	-	
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-	40.000.000	40.000.000	-	-	40.000.000	-	
14	Koordinasi dan Pencapaian Sistem Informasi Kepegawaian			-	40.000.000	30.000.000	-	-	40.000.000	-	
15	Pendataan dan Pengolahan Data Perilaku Kegawanan Berkelanjutan Tahun dan Rumpun			30.000.000	20.000.000	25.000.000	-	-	20.000.000	-	
16	Peningkatan Teknik Kepegawaian: Penyalah Penggunaan Undang- Undang Kepegawaian Kecamatan			-	20.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	-	
17	Peningkatan Teknik Kepegawaian: Penyalah Penggunaan Peraturan dan Perangkat Kepegawaian Kecamatan			20.000.000	20.000.000	20.000.000	8.000.000	13.000.500	20.000.000	13.000.500	
18	Peningkatan Teknik Kepegawaian: Penyalah Penggunaan Peraturan dan Perangkat Kepegawaian Kecamatan			-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	
19	Peningkatan Teknik Kepegawaian: Penyalah Penggunaan Peraturan dan Perangkat Kepegawaian Kecamatan			50.000.000	60.000.000	60.000.000	44.812.500	54.509.500	60.000.000	54.509.500	
20	Peningkatan Teknik Kepegawaian: Penyalah Penggunaan Peraturan dan Perangkat Kepegawaian Kecamatan			14.000.000	12.000.000	12.000.000	11.258.000	11.720.000	12.000.000	11.720.000	
21	Peningkatan Teknik Kepegawaian: Penyalah Penggunaan Peraturan dan Perangkat Kepegawaian Kecamatan			40.000.000	40.000.000	40.000.000	25.925.000	35.893.000	40.000.000	35.893.000	
22	Peningkatan Teknik Kepegawaian: Penyalah Penggunaan Peraturan dan Perangkat Kepegawaian Kecamatan			-	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	
23	Peningkatan Teknik Kepegawaian: Penyalah Penggunaan Peraturan dan Perangkat Kepegawaian Kecamatan			-	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	
24	Peningkatan Teknik Kepegawaian: Penyalah Penggunaan Peraturan dan Perangkat Kepegawaian Kecamatan			200.000.000	200.000.000	200.000.000	136.903.000	152.132.000	200.000.000	152.132.000	
25	Peningkatan Teknik Kepegawaian: Penyalah Penggunaan Peraturan dan Perangkat Kepegawaian Kecamatan			-	60.000.000	60.000.000	-	-	60.000.000	-	
26	Peningkatan Teknik Kepegawaian: Penyalah Penggunaan Peraturan dan Perangkat Kepegawaian Kecamatan			-	60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	
27	Peningkatan Teknik Kepegawaian: Penyalah Penggunaan Peraturan dan Perangkat Kepegawaian Kecamatan			60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	-	60.000.000	-	
28	Peningkatan Teknik Kepegawaian: Penyalah Penggunaan Peraturan dan Perangkat Kepegawaian Kecamatan			-	60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	

78	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pemukiman Terhadap Tumbuh dan Bertumbuhnya Pemukiman Rumah di luar Kawasan Pemukiman Rumah dengan luas di bawah 30 (Sepuluh) Ha				100.000.000	100.000.000			100.000.000		
79	Raja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di luar Kawasan Pemukiman Rumah dengan luas di bawah 30 (Sepuluh) Ha				100.000.000	100.000.000			100.000.000		
80	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS URBAN (PSU)			1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.400.000.000		1.400.000.000		
81	Unitas Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.400.000.000		1.400.000.000		
82	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			800.000.000	200.000.000	200.000.000			800.000.000		
83	Penyediaan Pasokan, Sertina, dan Utilitas URBAN di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Mekanis			1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.907.061.500	2.251.000.000	1.000.000.000		
84	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Pasokan, Sertina, dan Utilitas URBAN Perumahan			200.000.000	80.000.000	80.000.000	58.419.400	17.877.400	80.000.000		
85	Verifikasi dan Penyelesaian PSU Perumahan dan Pengembang				40.000.000	40.000.000			40.000.000		
86	Penyediaan Tenaga Kerja Untuk Masyarakat				100.000.000	100.000.000					

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 47 Tahun 2016, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Pembangunan di bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta pelaksanaan kebijakan Pembangunan Daerah. Keberadaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu ujung tombak Pembangunan di Daerah, memiliki Tugas dan Fungsi Pelayanan Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga dapat menjamin kesinambungan Pembangunan di Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berikut Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan :

Tabel 2.6
Persepsi Tentang Cara Berpangan diawal Pandemi Tahun 2020
Kabupaten Gorontalo Selatan

[illegible]

14	Penyusunan Rencana Perangkoan Daerah	Dispersim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	40.000.000	40.000.000	Dispersim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	40.000.000
15	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akutabel	Dispersim	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.911.923.300	2.911.923.300	Dispersim	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akutabel	100%	2.911.923.300
16	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Dispersim	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/Bulan	2.585.923.300	2.585.923.300	Dispersim	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/Bulan	2.585.923.300
17	Penyediaan Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dispersim	Penyediaan Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	Dispersim	Penyediaan Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	300.000.000
18	Administrasi Keuangan Akhir Tahun SPK dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dispersim	Administrasi Keuangan Akhir Tahun SPK dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	30.000.000	30.000.000	Dispersim	Administrasi Keuangan Akhir Tahun SPK dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	30.000.000
19	Administrasi Kepegawaian	Dispersim	Administrasi Kepegawaian	100%	170.000.000	170.000.000	Dispersim	Administrasi Kepegawaian	100%	170.000.000
20	Administrasi Kepegawaian	Dispersim	Administrasi Kepegawaian	1 Paket	30.000.000	30.000.000	Dispersim	Administrasi Kepegawaian	1 Paket	30.000.000
21	Administrasi Kepegawaian	Dispersim	Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	40.000.000	40.000.000	Dispersim	Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	40.000.000
22	Administrasi Kepegawaian	Dispersim	Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	40.000.000	40.000.000	Dispersim	Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	40.000.000
23	Administrasi Kepegawaian	Dispersim	Administrasi Kepegawaian	4 Orang	30.000.000	30.000.000	Dispersim	Administrasi Kepegawaian	4 Orang	30.000.000
24	Administrasi Kepegawaian	Dispersim	Administrasi Kepegawaian	3 Orang	30.000.000	30.000.000	Dispersim	Administrasi Kepegawaian	3 Orang	30.000.000
25	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispersim	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	472.000.000	472.000.000	Dispersim	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	472.000.000
26	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispersim	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	10.000.000	10.000.000	Dispersim	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	10.000.000
27	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispersim	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	12.000.000	12.000.000	Dispersim	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	12.000.000
28	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispersim	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	55.000.000	55.000.000	Dispersim	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	55.000.000

50	Penelitian dan Pengembangan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dispersim	Verifikasi dokumen perencanaan pemetaan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh	100%	480.000.000	Penelitian dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dispersim	Terwujudnya dokumen dan peningkatan kualitas permukiman kumuh	100%	480.000.000
51	Survei dan Pemetaan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dispersim	Jumlah Hasil Survei dan Pemetaan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	150.000.000	Survei dan Pemetaan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dispersim	Jumlah Hasil Survei dan Pemetaan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	150.000.000
52	Pemetaan Publik Perumahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Dispersim	Jumlah Laporan Pelaksana Pemetaan Publik Perumahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100%	80.000.000	Pemetaan Publik Perumahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Dispersim	Jumlah Laporan Pelaksana Pemetaan Publik Perumahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	100%	80.000.000
53	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemukiman/Perumahan	Dispersim	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemukiman/Perumahan	2 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemukiman/Perumahan	Dispersim	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemukiman/Perumahan	2 Laporan	100.000.000
54	Pengawasan/Review Kebijakan/Regulasi yang Tersetujui/Review/Terlegalisasi	Dispersim	Jumlah Dokumen Kebijakan/Regulasi yang Tersetujui/Review/Terlegalisasi	1 Dokumen	150.000.000	Pengawasan/Review Kebijakan/Regulasi yang Tersetujui/Review/Terlegalisasi	Dispersim	Jumlah Dokumen Kebijakan/Regulasi yang Tersetujui/Review/Terlegalisasi	1 Dokumen	150.000.000
55	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dispersim	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	100%	2.580.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dispersim	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	100%	2.580.000.000
56	Perencanaan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	Dispersim	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	300.000.000	Perencanaan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	Dispersim	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	300.000.000
57	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Diberikan	Dispersim	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diberikan	15 Unit Rumah	500.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Diberikan	Dispersim	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diberikan	15 Unit Rumah	500.000.000
58	Pelaksanaan Pembangunan/Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	Dispersim	Jumlah Pembangunan/Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	5 Ha	1.500.000.000	Pelaksanaan Pembangunan/Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	Dispersim	Jumlah Pembangunan/Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh	5 Ha	1.500.000.000
59	Pendataan dan Verifikasi Pemukiman Kumuh yang Teridentifikasi	Dispersim	Jumlah Dokumen Data Pemukiman Kumuh yang Teridentifikasi	1 Dokumen	80.000.000	Pendataan dan Verifikasi Pemukiman Kumuh yang Teridentifikasi	Dispersim	Jumlah Dokumen Data Pemukiman Kumuh yang Teridentifikasi	1 Dokumen	80.000.000
60	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni yang Diberikan	Dispersim	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Diberikan	5 Unit	200.000.000	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni yang Diberikan	Dispersim	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Diberikan	5 Unit	200.000.000
61	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KUMUH	Dispersim	Penyusunan perencanaan kawasan kumuh	70%	200.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KUMUH	Dispersim	Penyusunan perencanaan kawasan kumuh	70%	200.000.000
62	Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dispersim	Meningkatnya kualitas PSU di luar kawasan kumuh	100%	200.000.000	Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dispersim	Meningkatnya kualitas PSU di luar kawasan kumuh	100%	200.000.000

6a	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Peningkatan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Disperkim	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Peningkatan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Disperkim	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Peningkatan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang	5 Unit Rumah	100.000.000
6b	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Peningkatan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Disperkim	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Disperkim	Jumlah Dokumen kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	100.000.000
6c	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Disperkim	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Disperkim	Penertasan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Layak	100%	1.580.000.000
6d	Usaha Penyelenggaraan PSU Pemukiman	Disperkim	Usaha Penyelenggaraan PSU Pemukiman	Disperkim	Meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas umum	100%	1.580.000.000
7a	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Pemukiman untuk Meningkatkan Fungsi Hunian	Disperkim	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Pemukiman untuk Meningkatkan Fungsi Hunian	Disperkim	Jumlah Lokasi Pemukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Meningkatkan Fungsi Hunian	2 Lokasi	1.500.000.000
7b	Verifikasi dan Peningkatan PSU Pemukiman dan Penyelenggaraan	Disperkim	Verifikasi dan Peningkatan PSU Pemukiman dan Penyelenggaraan	Disperkim	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Pemukiman yang	1 Laporan	80.000.000
Total Rancangan awal KRPD							10.377.923.300

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang terangkum dalam Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman semaksimal mungkin dapat mengakomodir kebutuhan setiap lapisan dalam masyarakat, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. Mekanisme pengajuan usulan program dan kegiatan oleh masyarakat dapat di tampung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari bidang-bidang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya usulan program dan kegiatan tersebut dikelompokkan dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai instansi teknis pembangunan daerah.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2019
Kabupaten Bengkulu Selatan

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	desa dusun tengah, Kab. Bengkulu Selatan	pembangunan siring pasang jalan lingkungan		kalaupun musim penghujan air menggenang dimana-mana
2	Perbaikan rumah tidak layak huni	RT.1,RT2,RT3,RT4 Pasar baru Segitim, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		masih banyak rumah yang belum layak huni
3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Desa Tambangan, Kab. Bengkulu Selatan	pembangunan siring pasang jalan lingkungan		Banjir Ketika Musim Hujan
4	Perbaikan rumah tidak layak huni	Desa Puding, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		rumah tangga miskin masih banyak
5	Perbaikan rumah tidak layak huni	Desa kumbang Seri, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		Salah satu warga desa Puding masih ada yang tinggal di anjung/pondok, maka perlu bantuan bedah rumah atas nama yugi/ela
6	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Desa Merambung, Kab. Bengkulu Selatan	pembangunan siring pasang jalan lingkungan		Sering Banjir Di saat musim hujan
7	Perbaikan rumah tidak layak huni	IL Swadaya RT.15, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		Adanya kondisi dimana rumah warga yang masih belum layak huni untuk itu perlu diperbaiki demi kenyamanan dan keberlangsungan hidup warga yang bermukim disana
8	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Desa Ganjuh, Kab. Bengkulu Selatan	Pembuatan Siring Pasang		jalan sempit
9	Perbaikan rumah tidak layak huni	Desa Kebanjati, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		Masih Banyak Rumah Masyarakat yang belum layak huni
10	Perbaikan rumah tidak layak huni	Desa Desa Batu-Pasir, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		Banyaknya rumah tidak layak huni di desa Kebanjati
11	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Desa Nanti Agung, Kab. Bengkulu Selatan	pembangunan siring pasang		banyaknya genangan air saat turun hujan dan memasuki halaman warga Desa
12	Perbaikan rumah tidak layak huni	Desa Temang Besar Kecamatan Bedulang, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		masih terdapat rumah yang tidak layak huni di Desa

13	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jalan Lingkar Desa Padang Bindu, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		Masih terdapat rumah belum layak huni dan masyarakat belum punya tempat tinggal hunian
14	Perbaikan rumah tidak layak huni	Lubuk Sirih Ilir, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		Masih banyak warga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.
15	Perbaikan rumah tidak layak huni	Perumnas Kayu Kanyit RT.08, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		Masih Banyak rumah warga tidak layak huni
16	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Desa Tanjung Eran, Kab. Bengkulu Selatan	pembangunan siring pasang jalan lingkungan		sering terjadinya banjir
17	Perbaikan rumah tidak layak huni	TPU Desa Suka Jaya, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		Masih Adanya rumah yang KURANG LAYAK HUNI sehingga perlu Peningkatan Pembangunan Rumah
18	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Dusun I dan II Desa Tungkai II, Kab. Bengkulu Selatan	Pembuatan dan rehab pagar TPU		Banyak hewan ternak yang masuk ke area TPU Untuk menghindari pengeseran tanah dengan warga
19	Perbaikan rumah tidak layak huni	desa Pagar Banyu, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		Bedah Rumah dan Pembuatan WC, Masih Adanya Rumah Warga Tidak Layak Huni dan WC Tidak layak Pakai
20	Perbaikan rumah tidak layak huni	desa suka negeri, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		Di desa Pagar Banyu, masih ada beberapa rumah yang tidak layak huni, sehingga terlihat kesenjangan sosial didalam kehidupan bermasyarakat untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukannya bedah rumah agar menjadi rumah layak huni.
21	Perbaikan rumah tidak layak huni	Desa Mela'o, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		adanya rumah yang masih belum layak
22	Perbaikan rumah tidak layak huni	desa Betungan, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		masih terdapatnya rumah yang tidak layak huni atau juga bisa disebut dengan miskin ekstrim dengan keputusan kepala desa dan masyarakat untuk mengajukan bantuan bedah rumah
23		Desa Betungan, Kab. Bengkulu Selatan	pembangunan siring pasang jalan lingkungan		belum adanya siring pasang sehingga mengakibatkan genangan yang cukup besar karena siringnya tidak rata itu membuat warga tidak nyaman dengan ini kami mengajukan usulan pembuatan siring panjang
24	Perbaikan rumah tidak layak huni	desa hmas, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		masih terdapatnya rumah yang tidak layak huni atau juga bisa disebut dengan miskin ekstrim dengan keputusan kepala desa dan masyarakat untuk mengajukan bantuan bedah rumah
25	Perbaikan rumah tidak layak huni	Desa persembing, Kab. Bengkulu Selatan	Bedah Rumah		Masih terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 30 unit
26	Perbaikan rumah tidak layak huni		Bedah Rumah		Masih banyak masyarakat yang mempunyai rumah belum layak huni

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 5 tahun. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada table 3.1

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman	Meningkatnya akses rumah layak huni dan infrastruktur dasar secara berkelanjutan
2.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Meningkatnya kualitas perencanaan, kualitas keuangan dan kualitas administrasi kepegawaian

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dan sesuai Nomenklatur yang ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 mengimplementasikan program tersebut telah disusun beberapa program dan kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Kegiatan Penataan Organisasi
2. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - b. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana kerja yang disusun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

Terwujudnya kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan perlu didukung oleh:

1. Komitmen dari pemerintah daerah untuk merealisasikan revitalisasi lembaga umum tombak pembangunan daerah guna mendukung keberadaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang profesional.
2. Terjadinya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembangunan infrastruktur di daerah.

Rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 yang meliputi:

1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021-2026 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan renstra secara berkala.

Manna, 2024

Kepala Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Bengkulu Selatan

DECKY ZULKARNAIN, S.Sos

NIP. 19731029 199303 1 003